

OPINI MASYARAKAT TERHADAP CALON WALIKOTA PEREMPUAN PADA PEMILU KADA KOTA PEKANBARU TAHUN 2011

Shelly Rizki
Fisip – Universitas Riau, Pekanbaru
Jl. HR Subrantas , Km 12,5 Pekanbaru, Riau 28293
shellyrizki@gmail.com

ABSTRACT

The city of Pekanbaru held two mayoral elections. The first election was held on May. 18, 2011 and the second on Dec. 21, 2011. In the local elections of Pekanbaru, there are two candidates Mayor and Deputy Mayor are validated by the Election Commission in the city of Pekanbaru. One of the candidates are women that Septina Primawati. Candidate is the first female mayor in the city of Pekanbaru. As one female candidate for mayor, running Septina Primawati get special attention in the community. The emergence of women candidates for mayor, a conversation as well as the pros and cons in the community.

The purpose of this research was to determine public opinion of the female candidates for mayor on Election Pekanbaru City in 2011 and to know the cause of the defeat of couples Septina Erizal Primawati-Muluk in Pekanbaru City Election in 2011. As for the theory (approach) used as a tool of analysis in of this research is public opinion, political communication, voter behavior and election. While research method used was a qualitative analysis. Data collection techniques include: documentation and interviews. In-depth interviews on several community representatives and supporting informants.

Keyword : Public opinion, Political communication, Voter behavior, Election.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala daerah merupakan sarana asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) perubahan kedua (Pasca Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*”

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011. Dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru tahun 2011, KPUD Kota Pekanbaru selaku penyelenggara menetapkan dua pasangan calon beserta nomor urutnya pada 4 April 2011. Kedua pasangan calon tersebut antara lain pasangan nomor urut satu yang ditempati oleh pasangan Firdaus – Ayat Cahyadi (PAS) dan pasangan nomor urut dua yang diduduki oleh pasangan Septina Primawati Rusli - Erizal Muluk (BERSERI).

Dua Pasang calon terpilih merupakan pasangan yang diusung oleh partai politik, kedua-duanya hampir mempunyai dukungan yang sama kuat bila dilihat dari partai-partai pendukung yang berada di belakang calon. Pasangan Septina - Erizal didukung Partai Golkar, PAN, PPP, PKB dan Gerindra. Pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi diusung partai PKS, Hanura, PBB, PDK, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

Munculnya calon Walikota perempuan, Septina Primawati Rusli sebagai calon Walikota pada Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Pekanbaru tahun 2011, menjadi perbincangan serta pro dan kontra ditengah masyarakat dikarenakan terdapat berbagai pendapat atas kepemimpinan perempuan dilihat dari sudut pandang yang berbeda seperti berdasarkan agama, budaya dan stereotipe gender. Kepala daerah Kota Pekanbaru sebelumnya belum pernah dijabat oleh seorang perempuan. Dalam hal ini, Riau dapat dikatakan terlambat memiliki Kepala daerah seorang perempuan, karena seperti yang kita ketahui beberapa daerah di Indonesia telah lama memiliki kepala daerah perempuan. Oleh karena itu, dengan munculnya calon perempuan pada Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Pekanbaru mendapatkan perhatian khusus di masyarakat Kota Pekanbaru.

Dengan adanya fenomena pencalonan Septina Primawati Rusli sebagai calon Walikota pada Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 mendapatkan perhatian yang cukup besar dikalangan masyarakat dikarenakan untuk pertama kalinya kota Pekanbaru akan memiliki Kepala daerah perempuan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Opini Masyarakat Terhadap Calon Walikota Perempuan pada Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu: *bagaimana opini masyarakat terhadap calon Walikota perempuan pada Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 dan apa penyebab kekalahan pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk pada pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011?*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelaskan diatas adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa opini masyarakat terhadap calon Walikota perempuan pada Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 dan untuk mengetahui penyebab kekalahan pasangan

Septina Primawati dan Erizal Muluk pada Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah :

Secara akademis :

1. Sebagai bahan pertimbangan dan menambah wacana akademisi bagi perkembangan teori-teori terkait dengan isu-isu jender.
2. Sebagai bahan bacaan bagi pihak-pihak yang meminati studi perempuan dalam panggung politik.
3. Sebagai salah satu prasyarat kelulusan program strata-1 untuk meraih gelar sarjana.

Secara Praktis :

1. Sebagai bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Konsep Teori

1.4.1 Opini Publik

Opini publik berasal dari bahasa Inggris *Public Opinion*. Menurut Djoenasih S. Soenarjo, opini publik dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan “pendapat umum”, dengan demikian *public* diterjemahkan sebagai umum, sedangkan *opinion* dialihbahasakan menjadi “pendapat” (Ardianto, 2005:103). Opini publik terdiri dari dua komponen kata yaitu publik dan opini. Batasan dari publik adalah suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam masalah tertentu. Opini adalah ekspresi suatu sikap terhadap suatu topik tertentu (yang ramai dibicarakan).

Marian D. Irish dan James W. Prothro (dalam Effendy, 1998:56), menyebutkan bahwa opini publik adalah ekspresi sikap mengenai persoalan masyarakat. Definisi tersebut mencakup tiga aspek : (1) Ekspresi sikap yang tidak diekspresikan bukanlah opini publik, sebab sikap adalah predisposisi internal yang tidak bisa diobservasi secara langsung. (2) Persoalan/isu, yang dimaksud dengan persoalan atau isu disini adalah yang mengandung pro dan kontra, setuju atau tidak setuju. (3) Kemasyarakatan, opini publik lebih banyak bersangkutan dengan kemasyarakatan.

1.4.2 Komunikasi Politik

Komunikasi menurut D Laurence Kincaid adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. (Hafied Conbara, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta, Rajawali Press).

Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem politik. (Michael Rush dan Phillip Althoff , 2002: 24)

1.4.3 Perilaku Pemilih

Mengenai perilaku pemilih, Alwis mengemukakan bahwa pada intinya konsep voting itu berhubungan dengan pemberian suara dari individu sebagai anggota kelompok (warga masyarakat) dalam rangka menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu atau penentuan kebijakan publik. (Alwis, 1997: 22)

Berdasarkan perilaku, Newman mengelompokkan pemilih menjadi empat segmen :

1. Segmen pemilih rasional : kelompok pemilih yang memfokuskan perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihan politik.
2. Segmen pemilih emosional : kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan tertentu seperti kesedihan, keawatiran dan kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya. Faktor emosional ini sangat ditentukan oleh personalitas kandidat.
3. Segmen Pemilih sosial : kelompok yang mengasosiasikan pemilu dengan kelompok-kelompok social tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
4. Segmen pemilih situasional : kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan pilihannya. Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggerser pilihan politiknya jika terjadi kondisi-kondisi tertentu. (Adman Nursal , 2003:126)

II. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena terdapat calon Walikota perempuan pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011 yang mendapatkan perhatian khusus, perdebatan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

2.1.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yang memberikan keterangan dalam bentuk informasi yang diketahuinya. Berikut merupakan Informan yang dibutuhkan Peneliti.

Tabel II.1 Jumlah Informan Penelitian.

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	LSM Perempuan	1	Ketua Harian Pusdatin Puanri 2004-sekarang/Rahmita Budiatiningsih.SE,MHum.
2.	Budayawan/ Tokoh masyarakat	1	Tenas Effendy
3.	Partai pengusung/ Golkar	2	Ketua PK Golkar Kec.Tampian/ Nurdian KENA Kesatuan Perempuan Partai Golkar/ Masni Ernawati
4.	Partai Islam/ PKS	1	Wakil Sekretaris PKS/ Heri Fariad
5.	Akademisi	1	dosen UIN Suska Riau/ Prof.Dr. Alaidin Koto,MA
6.	PSW	1	ketua Pusat Studi Wanita Universitas Riau / Dra.Risdayati. M.Si
7.	KPUD Kota Pekanbaru	1	anggota KPU/ A.Z. Fachri Yasin. Ir. MAgr.
Total Jumlah Informan		8 orang	

Sumber : Data Olahan, 2012

2.1.3 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari paper, dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara yaitu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan memberikan kebebasan kepada informan dalam memberikan jawaban sepanjang yang informan ketahui tidak menyimpang dari masalah penelitian ini.

2.1.4 Sumber data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik perlu mendapatkan informasi yang jelas, sehingga data yang diperlukan lebih mudah disusun dan diolah. Adapun jenis data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dengan melakukan wawancara kepada responden penelitian. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari responden penelitian dengan daftar pertanyaan sesuai dengan sasaran penelitian. Data yang dibutuhkan adalah identitas responden, opini masyarakat terhadap calon Walikota perempuan pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011 dan penyebab kekalahan pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis untuk melengkapi data primer dari media dan instansi yang terkait dengan penelitian. Data pendukung penelitian diantaranya:

- Gambaran Umum Kota Pekanbaru
- Data Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2011
- Profil calon Walikota perempuan pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011.

2.1.5 Teknik Analisa Data

Setelah data berhasil dikumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data, maka penulis akan memilah-milah dan mengelompokkan sesuai dengan data dan kemudian akan diolah dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, penulis menganalisa data yang sudah terkumpul dengan menggunakan analisa kualitatif. Dalam hal ini peneliti menganalisa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, kemudian menganalisa fenomena yang terjadi. Sehingga mampu menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Opini masyarakat terhadap calon Walikota perempuan pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011.

3.1.1 Latar belakang keluarga

Septina Primawati Rusli merupakan sulung dari empat bersaudara dari pasangan H. Ismail Suko dan Hj. Roslaini. Ketiga adiknya yaitu Joni Irwan, Yunilda Safitri dan Afnita Adrini. Ayah Septina Primawati, Ismail Suko

merupakan tokoh politik di Riau dan Ibunya Hj. Roslain aktif dalam beberapa organisasi. Suaminya, Rusli Zainal merupakan Gubernur Riau selama 2 periode yaitu 2003-2008 dan 2009-2014. Sebagai Istri Gubernur, Septina memiliki kewajiban untuk menjadi pendamping suami dan membantu kegiatan suami. Hal ini juga merupakan pengalaman bagi dirinya dalam berkiprah dimasyarakat.

Septina dapat juga dikatakan memiliki bakat atau watak kepemimpinan karena sebagai anak dari seorang tokoh masyarakat.

“...Jadi kepemimpinan itu kan ada dua. Ada faktor keturunan ada faktor bakat. Ada faktor kemudian faktor inkredibilitas, faktor Pengalaman. Nah Jadi, Septina bisa saja karena anak Tokoh masyarakat jadi punya watak sebagai pemimpin...” Hasil wawancara dengan Bapak Alaidin Koto, (Guru Besar UIN Suska Riau) pada tanggal 11 Februari 2012.

Berdasarkan latar belakang keluarga dan lingkungan Ibu Septina yang memang berkecimpung dalam dunia politik memberikan pengaruh yang baik, karena berdasarkan penelitian penulis bahwa seseorang yang berada dan berkecimpung dalam dunia yang digelutinya akan menjadi lebih mudah baginya untuk berada dalam dunia politik yang akan dijalani karena faktor telah terbiasa.

“...Backgroundnya juga sebenarnya bagus. Karena ada kecenderungan di kita, kita perempuan selalu memilih profesi itu karena background dia. Septina, Suaminya orang politikus, Ayahnya politikus, kemudian beberapa teman-teman dia juga orang-orang itu, sehingga dia sudah terbiasa dengan dunia itu. Beda kalau seandainya kita dari luar yang masuk tiba-tiba keranah politik kita malah ragu gitu kan...”. Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Risdayati. MSi, (Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Riau) pada tanggal 2 April 2012.

3.1.2 Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan calon Walikota perempuan pada Pemilukada kota Pekanbaru tahun 2011 sudah memenuhi syarat. Ibu Septina Primawati memiliki latar belakang sebagai seorang akademisi. Sebelum suaminya menjabat sebagai Gubernur Riau, ia adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi, Universitas Riau. Septina telah menyelesaikan pendidikan Strata 2. Berdasarkan pendidikan, Septina sudah termasuk dalam persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan keputusan KPU juga dijelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi kepala daerah minimal berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat. Apabila dilihat dari segi Pendidikan tidak begitu memberikan pengaruh terhadap opini masyarakat, karena seseorang yang hanya memiliki pendidikan terakhir SMA juga masih banyak berani maju. Penyebab kekalahan pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk pada Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011.

Berikut merupakan riwayat pendidikan Ibu Septina Primawati sebagai berikut :

- Taman Kanak-Kanak (TK) Indria Jakarta
- Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Pekanbaru (1969-1970)
- Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Pekanbaru (1970-1973)

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pekanbaru (1974-1977)
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pekanbaru (1977-1980)
- Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1980-1985)
- Strata 2 (S2) Universitas Padjajaran Bandung (2000)

Apabila dilihat dari segi Pendidikan tidak begitu memberikan pengaruh terhadap opini masyarakat, karena seseorang yang hanya memiliki pendidikan terakhir SMA juga masih banyak berani maju. Karena berdasarkan keputusan KPU juga dijelaskan bahwa persyaratan untuk menjadi kepala daerah minimal berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi, masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan.

“...Kalau pendidikan saya rasa tidak jadi persoalan, karena pendidikan orang tamat SMA aja berani maju ya. Tidak ada masalah dengan background pendidikan beliau. Kalau syarat dari KPU, yang penting tamat SMA sudah bisa jadi Walikota...” Hasil wawancara dengan Bapak Hery Fariat (Wakil Sekretaris PKS) Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2012.

3.1.3 Pengalaman

3.1.3.1 Pengalaman sebagai Istri Gubernur

Pengalaman sebagai Istri Gubernur dapat dilihat dari kepemimpinannya sebagai Istri Gubernur. Sebelumnya Septina juga memiliki pengalaman sebagai Istri Bupati mendampingi suaminya yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Inhil. Kepemimpinan sebagai seorang Istri Gubernur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan Septina Primawati Rusli selama berkecimpung dalam beberapa organisasi dan kegiatan yang dilakukan selama menjadi Istri Gubernur.

Kepemimpinan Septina sebagai Istri Gubernur dan dalam berbagai bidang organisasi merupakan hal yang sangat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadapnya pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011. Masyarakat lebih mengenal figure Septina karena sering tampil sebagai Istri Gubernur dan mengikuti berbagai macam organisasi sosial kemasyarakatan.

Opini masyarakat yang terbentuk dari kalangan masyarakat awam terhadap pencalonan Ibu Septina sebagai calon Walikota yaitu berpendapat bahwa Septina sebagai Istri Gubernur tidak seharusnya mencalonkan diri sebagai Walikota.

“...Kalau pengaruh terhadap masyarakat nampaknya iya. Arti nampaknya iya, masyarakat melihat, ya memang kan dia sudah istri Gubernur untuk apalagi. Tetapi itu suatu pendapat masyarakat awam. Sebenarnya istri Gubernur walaupun ia istri Presiden sekalipun dia berhak. Sebagai warga Negara ia berhak tidak ada hubungannya dengan istri Gubernur, istri Presiden, tidak ada hubungannya dengan itu...”. Hasil wawancara dengan Bapak Alaidin Koto, Guru Besar UIN Suska Riau pada tanggal 11 Februari 2012.

3.1.3.2 Pengalaman sebagai Akademisi

Septina memiliki pengalaman sebagai seorang akademisi. Ia sempat menjadi Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Mulai mengajar dengan Jabatan fungsionalnya sebagai tenaga Edukatif pada tanggal 1 Mei 1990 dan karena kegigihannya menjadi dosen membuatnya mendapatkan gelar dosen teladan di tingkat Fakultas Ekonomi Universitas Riau . Namun pengalaman sebagai Akademisi terhenti karena Septina pada tahun 1999, pindah ke Tembilahan karena suaminya terpilih menjadi Bupati Indragiri Hilir (Inhil).

Karena latar belakang akademisnya, Septina terpilih menjadi ketua yayasan STIE Sri Gemilang milik pemerintah daerah kabupaten dan merupakan sekolah tinggi pertama di Inhil yang berdiri pada tahun 1999. Berikut merupakan hasil wawancara terhadap Ibu Rahmita Budiartiningsih, SE, MHum (Dosen Fakultas Ekonomi, Ketua Harian Pusdatin Puanri tahun 2004-sekarang) pada tanggal 16 Oktober 2012.

“...Beliau selama menjadi Dosen tidak pernah ada jabatan. Hal ini ya karena kariernya belum sempat berkembang. Karena pada saat itu, tahun 1999 beliau harus mendampingi suaminya yang terpilih sebagai Bupati Indragiri Hilir. Namun karena pengalaman akademisnya itu beliau menjadi Ketua STIE disana. Kalau menurut saya alasan beliau tidak pernah menjabat selama disana karena beliau harus mendampingi suaminya pada tahun 1999 itu...”

3.1.4 Kemampuan

Para ahli teori kepemimpinan mengemukakan beberapa teori tentang timbulnya seorang pemimpin. Terdapat 3 teori yang menjadi beberapa faktor seseorang menjadi pemimpin (Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1988:18) yaitu teori genetis, teori sosial dan teori ekologis. Teori ekologis merupakan perpaduan antara teori genetis dan teori sosial. Apabila kita melihat berdasarkan teori ekologis, Ibu Septina bisa dikatakan memiliki perpaduan antara faktor keturunan, bakat dan lingkungan yaitu faktor pendidikan, latihan dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut dapat teraktualisasi dengan baik.

“...Kalau menurut saya personnya mampu. Backgroundnya juga sebenarnya bagus. Karena ada kecenderungan di kita, kita perempuan selalu memilih profesi itu karena background dia. Seorang dokter itu biasanya kalau kita rujuk lagi kebelakang pasti ada emaknya tah Bidan tah apa. Dia tak jauh-jauh dari dunia dia gitu ya. Beda dengan laki-laki. Sama dengan Septina, Suaminya orang politikus, Ayahnya politikus, kemudian beberapa teman-teman dia juga orang-orang itu, sehingga dia sudah terbiasa dengan dunia itu. Beda kalau seandainya kita dari luar yang masuk tiba-tiba keranah politik kita malah ragu gitu kan. Dia kan tidak, kemampuan dia bagus dan segala macam. Mungkin mainset masyarakatlah memandang yang belum bisa menerima 100%. Dan kalau kita tanya bener-bener sama masyarakat mungkin masyarakat bisa menerima dia tapi itu tadi trik dan intrik untuk memenangkan Pemilu itu kan macam- macam cara sehingga akhirnya dimenangkan juga tetap oleh yang lawannya kan gitu...”

Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Risdayati. MSi, (Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Riau) pada tanggal 2 April 2012.

3.1.5 Segi agama dan budaya

Dari segi agama, muncul pendapat yang menafsirkan bahwa dalam ajaran Islam tidak memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Tentu saja hal ini sangat menjadi isu yang ramai diperbincangkan, mengingat penduduk Kota Pekanbaru mayoritas beragama Islam. Namun, dalam Islam itu sendiri terdapat dua pendapat mengenai perempuan sebagai seorang pemimpin. Semua hanya berdasarkan pada bagaimana cara kita menelaah dari sudut pandang tertentu. Perbincangan mengenai kepemimpinan perempuan dalam wacana Islam melahirkan dua aliran besar, *Pertama*, aliran yang mengklaim bahwa Islam tidak mengakui hak perempuan menjadi pemimpin, baik dalam ranah domestik terlebih lagi dalam ranah publik. *Kedua*, aliran yang berpendapat bahwa Islam mengakui hak-hak perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam mengakui kepemimpinan perempuan termasuk menjadi kepala negara.

Berdasarkan kedua pendapat ini, tentu kembali kepada pendapat masing-masing pribadi menilai dari sudut pandang masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa narasumber menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya tidak pernah tidak membolehkan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak diperbolehkannya perempuan menjadi pemimpin dalam keluarga, misalnya imam dalam sholat. Hal ini lah yang ditanggapi berbeda bagi mereka yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak boleh pemimpin perempuan.

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber sebagai berikut:

“...Persoalannya, kalau persoalan agama. Tidak ada istilah setuju atau tidak setuju, tapi boleh atau tidak. Sejauh yang saya pelajari sampai ketinggian S3 saya pelajari, Islam tidak melarang...” Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, Ma (Guru Besar UIN Suska Riau) pada tanggal 11 Februari 2012.

“...Dari segi agama ada dua pendapat sebagian berpendapat boleh, sebagian berpendapat tidak. Dan ini pun terpulanglah keorang masing-masing orang yang memiliki keyakinannya kemana. Tapi kita lihat banyak juga perempuan-perempuan menjadi pemimpin. Termasuk Fatimah menjadi pemimpin. Walikota perempuan juga di Tanjungpinang. Itu terpulang kepada masing-masing orang punya keyakinan. Yang penting kita simak disitu, kalau orang budaya melayu itu dia selalu mengacu kepada kriteria pemimpin itu sendiri. Didalam kriteria itu tidak ada dikatakan itu harus laki-laki harus si anu si anu itu tidak. Dia mengatakan yang patut kriteria menjadi pemimpin itu kriterianya misalnya beriman, bertakwa, amanah, segala macam itu kriteria menjadi pemimpin. Siapa orangnya terpulang pada masyarakat yang memilih pemimpin itu. Itu

dasarnya kan itu. Jadi artinya tidak ada arti yang jelas bahwa perempuan tidak boleh itu tidak. Macam di Penyengat, pemegang Regalia Kerajaan kan perempuan Jadi arti dalam budaya Melayu ini, tidak ada batasan pasti bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Sepanjang dia punya kriteria, dan didukung oleh masyarakat. Silahkan menjadi pemimpin...". Hasil wawancara dengan Bapak Tenas Effendy, (Tokoh masyarakat Kota Pekanbaru) pada tanggal 18 April 2012.

Kota Pekanbaru sangat identik dengan budaya melayu. Melayu dikenal dengan konsep politik yang sangat santun, santun dalam berbahasa, sopan dalam bersikap, tidak memfitnah orang lain dan mendidik rakyat untuk cerdas. Perempuan melayu terkadang masih dihadapkan dengan patriarki yang ada. Masyarakat masih terbiasa dengan budaya patriarki, yang merupakan suatu paham yang lebih mengedepankan laki-laki. Masih adanya isu- isu gender dikalangan masyarakat sehingga perempuan masih sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Tenas Effendi, didalam budaya melayu yang dikatakan patriarki itu lebih kepada pewarisan, keturunan maupun gelar yang diperoleh dari ayah.

"...Patriarki ini tidak tergantung pada masalah kepemimpinan tapi tergantung pada pewarisan, kepada keturunan, gelar, keturunan gelarnya diambil dari ayah. Ayahnya said anaknya said, ayahnya tengku anaknya tengku, ayahnya wan anaknya wan atau pembagian pusaka sesuai hukum-hukum terkait..." Bapak Tenas Effendy, (Tokoh masyarakat Kota Pekanbaru) pada tanggal 18 April 2012.

3.1.6 Peran media massa

Peran media massa yang dilakukan pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk sudah sangat optimal. Hal ini dapat dilihat dari usaha tim sukses yang dilakukan sudah sangat baik. Melalui media, seperti iklan di koran, baliho dimana banyak sekali terlihat Septina dan pasangannya.

Media massa berperan penting pada saat sosialisasi dan kampanye. Media massa menjadi penentu dalam membentuk opini masyarakat pemilih. Hanya saja dalam hal ini sempat beredar masalah dengan salah satu media massa yang terlalu memihak terhadap salah satu pasangan dan menjatuhkan pasangan lain.

"...Media secara keseluruhan ada berkembang ya. Tapi ada media tertentu yang saya tengok terlalu tendensif, terlalu memihak satu pasangan menjatuhkan pasangan yang lain. Saya kira media seperti itu tidak cerdas. Ada media yang terbit hanya untuk Pemilukada juga ada. Itukan hanya media sesaat. Dan itu membodoh-bodohi masyarakat. Media ini tidak berfungsi sebagai mencerdaskan masyarakat...". Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, Ma (Guru Besar UIN Suska Riau) pada tanggal 11 Februari 2012.

3.1.7 Pemimpin yang diharapkan masyarakat kota Pekanbaru

Pemimpin yang diharapkan masyarakat Kota Pekanbaru adalah pemimpin yang mengerti akan Fungsi Kota, memahami masyarakat Kota,

memahami budaya kota dan merupakan figure yang agamis karena kota Pekanbaru memiliki budaya melayu dan seperti yang kita ketahui budaya melayu sangat agamis. Masyarakat kota Pekanbaru juga mengharapkan untuk kedepannya pemimpin daerah/kota bisa benar-benar dengan niat ingin menyumbangkan dirinya untuk kepentingan rakyat.

“...Yang jelas figure yang memimpin yang pertama orang yang memahami Fungsi Kota, memahami masyarakat Kota, memahami budaya kota dan kemudian figure yang harusnya figure yang punya jiwanya adalah agamis karena orang melayu adalah orang yang agamis. Itu harus dipertahankan. Dan tentu dia punya kemampuan. Dan kita berharap untuk kedepan pemimpin-pemimpin kota/daerah dan nasional sekalipun jangan karena uang...” Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Alaidin Kota, Ma (Guru Besar UIN Suska Riau) pada tanggal 11 Februari 2012.

“...Yang bisa mewakili aspirasi masyarakat. Orang yang jujur yang punya komitmen. Karena permasalahan kota ni tidak semudah kita anggap apa..paling tidak dia punya kapasitas, punya pengalaman...” Hasil wawancara dengan Bapak Heri Fariel (Wakil Sekretaris PKS Kota Pekanbaru) pada tanggal 13 Februari 2012.

“...Yang kita harapkan seperti kriteria kotamadya. Orang Melayu itu pemimpinnya acuannya moral, akhlak. Orang yang beriman, orang yang amanah, orang yang berdana lapang, berpikiran panjang, yang tulus, ikhlas dan adil. Selalu Berhati bersih, ada beberapa criteria yang banyak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri dan adat budaya Melayu itu. Apalagi masyarakat Pekanbaru masyarakat yang majemuk. Tapi semua nilai itu ada di dalam masyarakat kita. Di dalam minang ada nilai itu. Semua ada nilai-nilai itu. Nah itu yang kita kedepankan...” Hasil wawancara dengan Bapak Tenas Effendy, (Tokoh masyarakat Kota Pekanbaru) pada tanggal 18 April 2012.

3.2 Penyebab kekalahan pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk

Penyebab kekalahan pada pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk ini dikarenakan masyarakat sudah teropini bahwa pemimpin harus laki-laki, Masyarakat belum terbiasa dengan kepemimpinan perempuan dan belum bisa menerima perempuan menjadi pemimpin. Berikut pernyataan Ibu Masni Ernawati, Anggota DPRD Kota Pekanbaru 7 Maret 2012 :

“...Ya. Kalau saya melihat beberapa tempat yang sudah saya minta pendapat tentang kepemimpinan perempuan. Memang jawaban mereka masih merasa belum terbiasa dengan pemimpin perempuan. Tetapi saya mengajak kepada masyarakat jangan melihat jenis kelamin, tapi melihat kemampuan kinerja seseorang. Mau dia perempuan, laki-laki yang penting dia mampu gak. Punya kemampuan...”

Belum terbiasanya masyarakat kota Pekanbaru dengan pemimpin perempuan dikarenakan masyarakat kota Pekanbaru yang masih menganut budaya patriarki. Dimana di dalam budaya patriarki masih mengedepankan laki-laki dari

pada perempuan. Budaya masyarakat melayu yang masih kental juga masih sangat menghormati laki-laki untuk menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Pemikiran masyarakat yang sudah teropini seperti ini yang menyebabkan perempuan belum bisa maju menjadi pemimpin di kota Pekanbaru.

“...Kalau kalah menang dalam suatu pertarungan itu kan biasa. dan saya melihat bahwa apa namanya, yang memilih ini kan langsung dipilih oleh masyarakat. Nah jadi bukan kealahannya kita lihat disitu. Tetapi adalah bagaimana masyarakat kita itu melihat bahwa Mereka itu mungkin masih belum sepenuhnya menerima kepemimpinan itu perempuan. Tapi kita kan tidak bisa mengatakan, tetapi mungkin juga berkaitan dengan suasana politik ,itukan jelas kemudian juga mainset orang, cara berpikir orang, kemudian juga banyak hal saya rasa. Tetapi kalau Ibu sendiri sebagai calon yang dikatakanlah belum menang, Beliau tidak menyikapi hal itu dengan suasana yang luar biasa. Maksudnya itu tidak Seperti dikatakan orang depresi, gak ada. dia mengatakan itu belum rezeki saya. Dan tidak ada pemenang kalau belum ada yang kalah...” Hasil wawancara dengan Ibu Rahmita Budiartiningsih, SE, MHum (Ketua Harian Pusdatin Puanri 2004-sekarang pada tanggal 27 April 2012.

“...Penyebab kekalahan. mungkin tidak maksimalnya kerja tim bisa jadi atau memang sudah kehendak masyarakat. Kalau dikatakan karena perempuan, artinya dia bagian dari kehendak masyarakat. Walaupun dia persentasenya tidak sampai 50%...” Hasil wawancara dengan Bapak Hery Fariel, Wakil Sekretaris PKS Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2012.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Opini masyarakat terhadap calon Walikota perempuan pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011 terdiri dari opini masyarakat terhadap calon Walikota perempuan pada Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011 yaitu :

1. Berdasarkan latar belakang keluarga dan lingkungan Ibu Septina yang memang berkecimpung dalam dunia politik memberikan pengaruh yang baik, karena berdasarkan penelitian penulis bahwa seseorang yang berada dan berkecimpung dalam dunia yang digelutinya akan menjadi lebih mudah baginya untuk berada dalam dunia politik yang akan dijalani karena faktor telah terbiasa.
2. Calon Walikota perempuan untuk pertama kalinya di kota Pekanbaru ini menjadi acuan bagi perempuan-perempuan Kota Pekanbaru yang memiliki kemampuan untuk bisa berani maju dan berkiprah dalam dunia politik. Perempuan juga layak maju karena memiliki hak yang sama untuk maju sebagai pemimpin. Isu gender masih menjadi persoalan dikalangan masyarakat awam belum terbiasa untuk dipimpin oleh perempuan.

3. Berdasarkan pandangan agama yaitu dalam Islam yang merupakan mayoritas agama yang dianut penduduk Kota Pekanbaru terdapat isu tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Namun hal ini ditanggapi masyarakat melalui sudut pandang yang berbeda. Isu yang datang dari segi budaya melayu dan adanya konsep patriarki yang mengedepankan laki-laki sebagai pemimpin masih mempengaruhi sebagian masyarakat.
4. Peran Media massa sebagai penentu dalam membentuk opini masyarakat pemilih. Masih terdapat media massa yang terlalu memihak terhadap salah satu pasangan dan menjatuhkan pasangan lain.
5. Penyebab kekalahan terdapat pada faktor masyarakat. Dimana masyarakat memiliki pandangan dipengaruhi oleh isu gender, sehingga masyarakat belum bisa menerima pemimpin seorang perempuan.

4. 2. Saran

Dengan adanya calon Walikota perempuan dalam Pemilukada Kota Pekanbaru tahun 2011 ini menjadi dorongan bagi perempuan-perempuan Kota Pekanbaru untuk lebih berani maju dan berkecimpung dalam dunia politik. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Di era modern seperti ini seharusnya masyarakat tidak terpengaruh oleh isu gender yang meliputi jenis kelamin, kehidupan pribadi, agama maupun budaya dari satu calon. Masyarakat seharusnya memilih berdasarkan kualitas diri dari setiap calon dan tidak terpengaruh terhadap opini yang tertanam sejak lama bahwa pemimpin tidak boleh perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adman Nursal. 2003. *Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Alwis. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Upaya Demokrasi di Daerah*. Pekanbaru.
- Ambo, 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer : Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Hardjito Notopuro. 1984. *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lexi J. Meleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Maimanah. 2007. *Pejuang Perempuan dari Riau*. Yayasan Makmur. Pekanbaru.
- Michael Rush Dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Press. Jakarta.
- Muhadjir, 2005. *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta. CV. Adipura.
- Robert Dahl, 1982. *Dilema Demokrasi Pluralis*, Rajawali : Jakarta.
- Romli, Lili. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia*. Yappika : Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. PT Grafindo Persada : Jakarta.

- Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang, 2005. *Pilkada Langsung: Problema dan Prospek*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, kesetaraan dan keadilan : suatu tinjauan berwawasan Gender*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siti Musdah Mulia & Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta..
- Soemirat, Soleh dan Elviro Ardianto, 2004. *Dasar-dasar Public Relation*. Remaja Rodakarya. Bandung.
- Solosa, Daniel S. 2005. *Mekanisme, Persyaratan dan Tatacara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No.32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Subagyo, Joko, P. 2001. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sumber lain :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<http://fikom-jurnalistik.blogspot.com>